

ABSTRAK

Skripsi, dengan judul “Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” ini disusun oleh Nimas Ayu Ningtyas dengan NIM. 1860103222170, Pembimbing Bapak Fahmi Arif, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, pendataan petani yang belum sepenuhnya maksimal, serta masih adanya petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan secara efektif, sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani? 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah dalam Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif (yuridis empiris) dan jenis pendekatannya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Penelitian ini membahas Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan petani, pendaftaran anggota kelompok tani, verifikasi data oleh pengurus kelompok tani, serta pengaitan data keanggotaan dengan program pemerintah seperti bantuan pertanian dan pupuk bersubsidi. Kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan petani memiliki legalitas keanggotaan dan memperoleh akses terhadap perlindungan serta pemberdayaan dari pemerintah daerah. Namun, Implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi kepada petani, pendataan yang belum maksimal, serta masih adanya petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Akibatnya, tujuan Pasal 58 untuk memperkuat kelembagaan petani dan memberikan akses yang merata terhadap program pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih lebih menonjol pada aspek administratif, sementara fungsi perlindungan dan pemberdayaan belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh petani. 2) Tinjauan siyasah terhadap pemberdayaan petani melalui kelompok tani dan penyaluran pupuk bersubsidi sejalan dengan prinsip masalah karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan memudahkan akses terhadap program pemerintah. Hal ini juga selaras dengan QS. Al-Hasyr ayat 7, yang mengajarkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang

kaya, tetapi juga memberi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal karena masih ada petani yang belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Kondisi ini membuat sebagian petani belum memperoleh akses penuh terhadap bantuan dan program pemerintah, sehingga kemaslahatan yang diharapkan belum dirasakan secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, pendataan yang lebih tertib, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengurus kelompok tani agar prinsip masalah benar-benar terwujud dalam praktik. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pendaftaran tidak menyulitkan petani, sehingga seluruh petani dapat terlibat secara adil dalam program pemberdayaan yang disediakan.

ABSTRACT

This thesis, entitled “Implementation of Article 58 of Regional Regulation Number 7 of 2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’ in the Registration of Farmers’ Group Membership (A Case Study in Durenan Village, Durenan Subdistrict, Trenggalek Regency)” was written by Nimas Ayu Ningtyas, Student ID Number. 1860103222170, under the supervision of Mr. Fahmi Arif, S.H., M.H.

Keywords: Implementation, Article 58 of Regional Regulation Number 7 of 2020, Protection and Empowerment of Farmers’ in the Registration of Farmers’ Group Membership

This study was motivated by the suboptimal Implementation of Article 58 of Regional Regulation No. 7 of 2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’ regarding the registration of farmers’ group membership in Durenan Village, Durenan Subdistrict, Trenggalek Regency. This situation is influenced by a lack of outreach from relevant parties, data collection on farmers’ that has not been fully optimized, and the fact that some farmers’ have not yet joined a farmers’ group. This situation indicates that efforts to protect and empower farmers’ have not been effective, and therefore require further review.

The research question’s used in this study are: 1) How is Article 58 of Regional Regulation Number 7 of 2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’ implemented in the registration of farmer group membership? 2) What is the policy perspective on farmer empowerment through farmers’ groups?

The research method employed by the researcher is a qualitative (empirical-juridical) approach, specifically a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used in this study include interview, observation, and documentation. The data analysis process consists of data collection, data processing, data presentation, and verification or drawing of conclusions. The findings of this study are as follows: 1) This study examines the Implementation of Article 58 of Regional Regulation No. 7 of 2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’ in the Registration of Farmers’ Group Membership in Durenan Village, Durenan Subdistrict, Trenggalek Regency. In practice, the activities carried out include collecting farmer data, registering farmers’ group members, verifying data by farmers’ group administrators, and linking membership data to government programs such as agricultural assistance and subsidized fertilizer. The program is essentially aimed at ensuring that farmers’ have legally recognized membership and gain access to protection and empowerment from the local government. However, the Implementation of these provisions has not yet been optimal because there are still several obstacles, including a lack of outreach to farmers’, incomplete data collection, and the fact that some farmers’ have not yet joined farmers’ groups. As a result, the objectives of Article 58 to strengthen farmers’ institutions and provide equitable access to government programs have not yet been fully achieved. This situation indicates that policy implementation continues to focus primarily on administrative aspects, while the protective and empowerment functions have not yet been fully realized by all farmers’. 2) A policy analysis of farmer empowerment through farmers’ groups and the distribution of subsidized fertilizer aligns with the principle of *maslahah*, as it aims to improve farmers’ well-being and facilitate access to government programs. This is also consistent with Quranic Surah

Al-Hasyr, verse 7, which teaches that wealth should not circulate solely among the wealthy but should also provide more equitable benefits to society. However, research findings indicate that this objective has not yet been fully achieved, as there are still farmers' who have not registered as members of farmers' groups. This situation means that some farmers' have not yet gained full access to government assistance and programs, so the intended benefits have not been felt by everyone. Therefore, more intensive outreach, more systematic data collection, and better coordination among local governments, village governments, and farmers' group leaders are needed to ensure that the principle of *maslahah* is truly realized in practice. In addition, the government must also ensure that the registration process does not create obstacles for farmers', so that all farmers' can participate equitably in the empowerment programs provided.

المخلص

هذه الرسالة الجامعية بعنوان: "تنفيذ المادة ٥٨ من اللائحة الإقليمية رقم ٧ لعام ٢٠٢٠ بشأن حماية وتمكين المزارعين في تسجيل عضوية مجموعة المزارعين (دراسة حالة في قرية دورينان، مقاطعة دورينان، منطقة ترينغاليك)"، أعدتها S.H., M.H. نيماس أيو نينغتياس، برقم الطالب ١٨٦٠١٠٣٢٢٢١٧٠، تحت إشراف الأستاذ فهمي عارف،

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، المادة ٥٨ من اللائحة المحلية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠، حماية المزارعين وتمكينهم، تسجيل عضوية المجموعات الزراعية.

تستند هذه الدراسة إلى عدم تحقيق التنفيذ الأمثل للمادة ٥٨ من اللائحة الإقليمية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية وتمكين المزارعين، ولا سيما في تسجيل عضوية مجموعات المزارعين في قرية دورينان، ناحية دورينان، محافظة ترينغاليك. وتتأثر هذه الحالة بقلة التوعية من الجهات المعنية، وعدم اكتمال عملية حصر بيانات المزارعين بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود بعض المزارعين الذين لم ينضموا بعد إلى مجموعات المزارعين. وتشير هذه الأوضاع إلى أن تنفيذ حماية وتمكين المزارعين لم يسر بشكل فعال، مما يستدعي إجراء دراسة أعمق.

صياغة المشكلة المستخدمة في هذا البحث هي: (١) كيف يتم تنفيذ المادة ٥٨ من اللائحة المحلية رقم ٧ لعام ٢٠٢٠ بشأن حماية وتمكين المزارعين في تسجيل عضوية مجموعات المزارعين؟ (٢) ما هو المنظور السياسي في تمكين المزارعين من خلال مجموعات المزارعين؟

تعتمد منهجية البحث التي استخدمها الباحث على المنهج الكيفي (القانوني التجريبي)، ونوع المقاربة هو الوصف الكيفي، أما تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث فتتمثل في المقابلات والملاحظة والتوثيق، في حين أن تحليل البيانات يتم عبر مراحل جمع البيانات ومعالجتها وعرضها ثم التحقق منها أو استخلاص النتائج. أما نتائج هذا البحث فهي كما يلي: (١) يتناول هذا البحث تنفيذ المادة ٥٨ من اللائحة الإقليمية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية وتمكين المزارعين، وذلك في تسجيل عضوية مجموعات المزارعين في قرية دورينان، ناحية دورينان، محافظة ترينغاليك، وفي تطبيقها تشمل الأنشطة المنفذة حصر بيانات المزارعين، وتسجيل أعضاء مجموعات المزارعين، والتحقق من البيانات من قبل إدارة المجموعة، وربط بيانات العضوية ببرامج الحكومة مثل المساعدات الزراعية والأسمدة المدعومة، وتهدف هذه الأنشطة أساساً إلى ضمان امتلاك المزارعين لصفة قانونية في العضوية وتمكينهم من الحصول على الحماية والدعم من الحكومة المحلية، غير أن تنفيذ هذه الأحكام لم يسر على نحو أمثل بسبب وجود عدة معوقات، منها ضعف التوعية لدى المزارعين، وعدم اكتمال عملية جمع البيانات، واستمرار وجود مزارعين لم ينضموا إلى مجموعات المزارعين، ونتيجة لذلك لم يتحقق هدف المادة ٥٨ في تعزيز المؤسسات الزراعية وتوفير وصول متكافئ إلى البرامج الحكومية بشكل كامل، وتُظهر هذه الحالة أن تنفيذ السياسات لا يزال يركز بشكل أكبر على الجوانب الإدارية، في حين أن وظائف الحماية والتمكين لم تلمس بشكل كامل من قبل جميع المزارعين؛ (٢) إن النظر من منظور السياسة الشرعية إلى تمكين المزارعين من خلال مجموعات المزارعين وتوزيع الأسمدة المدعومة يتوافق مع مبدأ المصلحة لأنه يهدف إلى تحسين رفاهية المزارعين وتسهيل وصولهم إلى البرامج الحكومية، ويتوافق ذلك أيضاً مع قوله تعالى في سورة الحشر الآية ٧ الذي يبين أن المال لا ينبغي أن يكون دُولَةً بين الأغنياء فقط بل ينبغي أن يعود بالنفع على المجتمع بشكل أوسع، ومع ذلك تُظهر نتائج البحث أن هذه الأهداف لم تتحقق بشكل أمثل إذ لا يزال هناك مزارعون لم يُسجلوا كأعضاء في مجموعات المزارعين، ويؤدي هذا الوضع إلى عدم حصول بعض المزارعين على الوصول الكامل إلى المساعدات والبرامج الحكومية، مما يجعل المصلحة المرجوة لم تتحقق بصورة شاملة، لذلك هناك حاجة إلى تكثيف التوعية وتحسين تنظيم عملية جمع البيانات وتعزيز التنسيق بين الحكومة المحلية وحكومة القرية وإدارة مجموعات المزارعين لضمان تحقق مبدأ المصلحة في الواقع العملي، إضافة إلى ذلك ينبغي على الحكومة التأكد من أن إجراءات التسجيل لا تشكل عيباً على المزارعين حتى يتمكن جميع المزارعين من المشاركة بشكل عادل في برامج التمكين المتاحة.